PENGARUH ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI



Nama : Hapsa Yosa NIM : 222015086

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2020

PENGARUH ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Nama : Hapsa Yosa NIM : 222015086

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Hapsa Yosa

Nim

: 222015086

Program Studi: Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Penulis, Agustus 2020

RAI HF652799147

Hapsa Yosa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

Alokasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi

Sumatera Selatan

Nama Hapsa Yosa NIM

222015086

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Mata Kuliah Pokok :

Akuntansi Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal

2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

<u>Drs. Sunardi.S.E.,M.Si</u> NIDN/NBM : 0206046378/849196

Lis Djuniar. S.E., M.Si NIDN/NBM: 0220067101/1115

Mengetahui, Dekan u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN/NBM: 0216106902/944806

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Hidup itu sebentar. Kamu harus bisa tersenyum saat merasakan kepedihan atau kita tak akan pernah menlanjutkan hidup."

(Jeff Ross)

"Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah dunimu (Penulis)

(Hapsa Yosa)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- * Ayahku (Pauzan) dan Ibuku (Linda)
- **❖** Adik-adikku
- ❖ Dosen Pembimbing Skripsi
- * Almamater Kebanggaanku

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan" tepat pada waktunya, dan meghasilkan Alokasi Belanja Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya secara parsial Belanja Operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Tak Terduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan selesainya skripsi ni, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si., dan Ibu Lis Djuniar, SE.,M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

 Bapak DR. M. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Para Dosen Pengasuh dan Karyawan serta seluruh Civitas Akademika yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si., selaku Pembimbing Satu yang telah memberikan masukan ilmu, waktu semangat dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Lis Djuniar. S.E.,M.Si., selaku Pembimbing Dua yang telah memberikan banyak arahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Ibu Saekarni Yuliachtri, S.E.,M.Si.,Ak.Ca., selaku Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memimbing saya selama menempuh perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Kedua Orang Tua penulis, ayahku Pauzan dan ibuku Linda yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan mendukungku dengan penuh semangat.
- 10. Saudara laki-laki Ade, Kemas dan Raif yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan dukungan .
- 11. Rekan Seperjuangan saya Angkatan 2015.
- 12. Teman-teman KKN Posko 220.

13. Semua pihak yang telah terlibat memberikan bantuan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

14. Untuk orang yang selalu memberikan semangat saya Kuntoro Adi Birowo.

15. Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "kapan wisuda?".

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada

penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang

disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk

penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan

pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.

Palembang, Agustus 2020 Penulis,

Hapsa Yosa

viii

DAFTAR ISI

	Hala	man
HALAN	MAN DEPAN	i
HALAN	MAN JUDUL	ii
HALAN	MAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAN	MAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAN	MAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAN	MAN PRAKATA	vi
HALAN	IAN DAFTAR ISI	ix
HALAN	IAN DAFTAR TABEL	xi
HALAN	IAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAN	IAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTR	AK	XV
ABSTR A	ACT	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
	HIPOTESIS	
	A. Landasan Teori	9
	1. Indeks Pembangunan Manusia	9
	2. Alokasi Belanja Daerah	15
	B. Penelitian Sebelumnya	26
	C. Kerangka Pemikiran	28
	D. Hipotesis	28
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	30
	B. Lokasi Penelitian	31

LAMPII	RAI	N	
DAFTA	R P	USTAKA	77
	В.	Saran	75
		1	
BAB V		MPULAN DAN SARAN	_
		Sumatera Selatan	73
		Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi	
		4. Pengaruh Belanja Tak Terduga terhadap Indeks	
		Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	71
		3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan	
		Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	69
		2. Pengaruh Belanja Operasi terhadap Indeks Pembangunan	
		Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	68
		dan Belanja Tak Terduga) terhadap Indeks Pembangunan	
		1. Alokasi Belanja Daerah (Belanja Operasi, Belanja Modal,	
	B.	Pembahasan	67
		3. Analisis Data	56
		2. Deskripsi Data	48
		1. Gambaran Umum	43
	A.	Hasil Penelitian	43
BAB IV	HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
		2. Teknik Analisis Data	37
		1. Analisis Data	36
	G.	Analisis Data dan Teknik Analisis Data	36
	F.	Metode Pengumpulan Data	35
		2. Sampel	34
		1. Populasi	33
	E.	Populasi dan Sampel	33
	D.	Data yang Diperlukan	32
	C.	Operasionalisasi Variabel	31

DAFTAR TABEL

	Hala	man
Tabel I.1	Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Operasi, Belanja	
	Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Kota Kabupaten	
	di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018	5
Tabel II.1	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen	15
Tabel II.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	26
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	31
Tabel III.2	Populasi Pemerintah Kota/Kabupaten	
	Provinsi Sumatera Selatan	34
Tabel III.3	Sampel Pemerintah Kota/Kabupaten	
	Provinsi Sumatera Selatan	35
Tabel III.4	Interpretasi Nilai R	41
Tabel IV.1	Luas Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi	
	Sumatera Selatan 2019	45
Tabel IV.2	Belanja Operasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	
	Tahun 2016-2018	49
Tabel IV.3	Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	
	Tahun 2016-2018	51
Tabel IV.4	Belanja Tak Terduga Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	ı
	Tahun 2016-2018	52
Tabel IV.5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi	
	Sumatera Selatan Tahun 2016-2018	55
Tabel IV.6	Belanja Operasi (X1), Belanja Modal (X2), Belanja Tak	
	Terduga (X ₃), Indeks Pembangunan Manusia (Y) Kabupaten/	
	Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018	57
Tabel IV.7	Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test	60
Tabel IV.8	Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel IV.9	Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel IV.10		63

Tabel IV.11	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R ²)	64
Tabel IV.12	Hasil Uji-F	65

DAFTAR GAMBAR

	Hala	ıman
Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	28
Gambar IV.1	Grafik Persentase Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten/	
	Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018	50
Gambar IV.2	Grafik Persentase Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/	
	Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018	52
Gambar IV.3	Grafik Persentase Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten/	
	Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018	54
Gambar IV.4	Grafik Persentase Indeks Pembangunan Manusia	
	Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	
	Tahun 2016-2018	56
Gambar IV.5	Grafik Scatterplot	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Hala	man
Lampiran 1.	Surat Selesai Riset dari BPS Prov Sumatera Selatan	79
Lampiran 2.	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	80
Lampiran 3.	Lembar Persetujuan Skripsi	81
Lampiran 4.	Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an (Surat Pendek).	82
Lampiran 5.	Sertifikat Toefl	83
Lampiran 6.	Hasil Perhitungan SPSS	84
Lampiran 7.	Biodata Penulis	94

ABSTRAK

Hapsa Yosa/222015086/2020/Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan mengetahui Alokasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan. Belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga ialah belanja pemerintah per kelompok jenis belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini memilih17 sampel pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan yang merealisasikan belanja operasi, modal, dan tak terduga tahun 2016 sampai 2018. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausalitas. Hasil penelitian ini Alokasi Belanja Daerah secara bersamasama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Secara parsial Belanja Operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Tak Terduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata kunci: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, IPM

ABSTRACT

Hapsa Yosa / 222015086 / 2020 / Allocation of Local Government Expenditures on the Human Development Index in the districts of South Sumatra Province

This study aimed to determine the allocation of local government expenditures on the human development index (HDI) in the districts of South Sumatra Province. Operational, capital and unexpected expenditures were government spending per group of expenditure types according to Government Accounting Standards (SAP). This study selected 17 samples of district/city governments of South Sumatra Province which realized operational, capital, and unexpected expenditures from 2016 to 2018. This type of research was associative causality. The results of this study showed that the regional expenditure allocation together had a positive and significant effect on the human development index in the regency/city of South Sumatra Province. Partially Operational expenditures had a positive and significant effect on the human development index (HDI), capital expenditures had a negative and significant effect on the human development Index, and unexpected expenditures had a negative and insignificant effect on the human development Index.

Keywords: operating expenditures, capital expenditures, unexpected expenditures, HDI

PENGESAHAN

NO. 467 / Abstract/LB/UMP/ ym / 20 20

Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang F

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya harus mencerminkan perubahan total dari suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Pembangunan memiliki tujuan akhir yaitu bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Selain itu juga, pembangunan yang sedang berkembang saat ini merupakan pembangunan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia (human development). Pembangunan ini menjadikan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat. Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia, baik layak secara materi maupun non materi.

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep ini menjadi dasar terbentuknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan

standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sejak saat itu, IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) (Badan Pusat Statistik, 2015: 1).

Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Selatan tentunya dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah, seperti belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas

desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan atas beban APBD. Pengeluaran pembiayaan untuk penyelenggaraan ini digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Pengalokasian belanja pada masing-masing jenis belanja diprioritaskan untuk urusan wajib. Urusan wajib yang dimaksud adalah belanja yang diproritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja modal yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Femonena terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana diberitakan Radar Palembang, Endang Triwahyuningsih selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel menyatakan bahwa pembangunan manusia Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. IPM Sumatera Selatan meningkat dari 64,44 pada tahun 2010 menjadi 70,02 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Selatan ratarata tumbuh sebesar 0,93 persen per tahun mulai tahun 2010. Pada periode 2018-2019 IPM Sumatera Selatan tumbuh 0,91 persen. Sedangkan Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih merupakan daerah tingkat II dengan IPM dalam kategori tinggi (70,5 IPM < 80), sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya masih dalam kategori sedang (60,5 1PM < 70) (http:///www.radar-palembang.com/ipm-sumsel-naik-status).

Terlepas dari pertumbuhan dan pergerakan Indeks Pembangunan Manusia yang positif, salah satu persoalan yang harus dihadapi saat ini adalah perbedaan jarak (disparitas). Di level kabupaten/kota lintas provinsi, tingkat kesenjangannya masih tinggi. Hal inilah yang menjadi permasalahan pembangunan terkait dengan kondisi geografis kabupaten/ kota provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian terdahulu mengenai alokasi belanja pemerintah daerah dan Indeks Pembangunan Manusia telah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Mahirsyah (2016) dan Ida (2019) menyatakan bahwa belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan studi Andaiyani (2012) menyimpulkan bahwa belanja operasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia.

Penelitian Santi (2013), Firda (2014), dan Wardihan (2019) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian Mahirsyah (2016) dan Ida (2019) menyimpulkan bahwa belanja modal dan belanja tak terduga tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia.

Fenomena terkait Indeks Pembangunan Manusia, dan pengelolaan keuangan daerah menurut belanja operasi, belanja modal, serta belanja tak terduga pada kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat tabel I.1 berikut.

Tabel I.1 Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga pada Kota Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018
(IPM, BO, BM, dan BTT dalam jutaan rupiah)

	(IPM, BO, BM, dan BTT dalam jutaan rupiah					
No	Kota/Kabupaten	Tahun	IPM	BO	BM	BTT
1.	Lubuklinggau	2016	73,57	604.104	205.417	422
		2017	73,67	633.723	237.004	473
		2018	74,09	650.007	209.920	68
2.	Banyuasin	2016	65,01	1.473.482	368.488	0
		2017	65,85	1.662.641	303.105	0
		2018	66,40	1.723.290	266.429	2.322
3.	Ogan Ilir	2016	65,45	880.646	222.328	0
		2017	65,63	769.445	345.998	0
		2018	66,43	820.500	275.666	4.681
4.	Muara Enim	2016	66,71	1.287.299	566.871	2.184
		2017	67,63	1.363.134	530.347	3.603
		2018	68,28	1.876.288	556.629	1.443
5.	Ogan Komering Ulu	2016	67,38	1.195.453	321.250	996
	Timur	2017	67,84	1.290.869	291.446	248
		2018	68,54	1.336.279	278.117	519
6.	Ogan Komering Ulu	2016	63,42	815.930	373.153	996
	Selatan	2017	63,96	920.482	292.933	412
		2018	64,84	916.416	311.606	181
7.	Empat Lawang	2016	64,00	579.182	198.992	221
		2017	64,21	688.133	202.981	112
		2018	64,81	719.648	248.436	0
8.	PALI	2016	61,66	453.428	351.124	606
		2017	62,58	564.563	393.155	20
		2018	63,49	736.844	622.813	7
9.	Musi Rawas Utara	2016	63,05	365.155	355.012	134
		2017	63,18	482.872	279.488	12
		2018	63,75	543.641	323.942	0
10.	Musi Banyuasin	2016	66,45	2.019.425	569.702	0
		2017	66,96	1.918.639	699.529	1.313
		2018	67,57	2.086.057	871.953	50
11.	Ogan Komering Ulu	2016	67,47	992.618	167.778	132
	_	2017	68,28	1.042.978	338.867	140
		2018	69,01	1.090.420	328.754	0
12.	Lahat	2016	65,75	1.424.036	373.661	1.055
		2017	66,38	1.418.797	341.994	205
		2018	66,99	1.524.907	309.562	15
13.	Musi Rawas	2016	64,75	1.093.737	432.324	108
		2017	65,31	1.126.355	317.467	10
		2018	66,18	1.286.432	361.983	0

14	Ogan Komering Ilir	2016	65,44	1.418.345	560.990	0
		2017	66,11	1.634.837	473.964	40
		2018	66,57	1.615.862	302.186	432
15.	Palembang	2016	76,59	2.337.279	577.697	993
		2017	77,22	2.284.790	857.095	64
		2018	77,89	2.636.796	851.367	81
16.	Prabumulih	2016	73,38	662.657	228.275	365
		2017	73,58	702.270	162.394	493
		2018	74,04	731.123	119.551	216
17.	Pagaralam	2016	65,96	550.259	246.648	1.423
		2017	66,81	546.579	195.242	1.789
		2018	67,62	562.844	92.576	183

(Sumber: LKPD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan, 2020)

Tabel I.1 di atas, menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terendah pada Kabupaten PALI. Sedangkan Alokasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Belanja Operasi terendah pada Kabupaten Musi Rawas Utara, Belanja Modal terendah pada Kota Prabumulih, dan Belanja Tak Terduga Kabupaten Banyuasin. Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga (3) indikator, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Penduduk Kabupaten PALI pada tahun 2019 berjumlah 189.764, penduduk Musi Rawas Utara berjumlah 192.199 jiwa, penduduk Kota Prabumulih berjumlah 186.834 jiwa, dan penduduk Kabupaten Banyuasin berjumlah 854.628 jiwa. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Kabupaten PALI sebesar 6,16, Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 4,16, Kota Prabumulih sebesar 5,55, dan Kabupaten Banyuasin 5,22. Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten PALI sebesar 13,47, Kabupaten Musi Rawas Utara 19,12, Kota Prabumulih 11,61, dan Kabupaten Banyuasin 11,33 (BPS Sumatera Selatan, 2020).

Mengkaji fenomena di atas, menurut penulis bahwa Alokasi Belanja Pemerintah Daerah kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (standar hidup layak) dengan alokasi belanja yang berbeda-beda, sehingga keefektifan atau ketepatan penggunaan Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Namun dalam kenyataan menunjukkan adanya ketimpangan terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah, dimana Kabupaten PALI yang Alokasi Belanja Daerahnya lebih tinggi dibandingkan Musi Rawas Utara, tetapi lebih rendah pada Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia dengan judul: "Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Alokasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Alokasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu yang didapat serta dapat mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk di kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan.

Bagi Intansi Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Wilayah
 Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah dapat merencanakan kebijakannya untuk menigkatkan Indeks

Pembangunan Manusia dengan memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhinya seperti alokasi belanja operasi, belanja modal, dan

belanja tak terduga.

3. Bagi Almamater

Menambah perbendaharaan bahan referensi yang akan melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia khususnya di kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zulyanto. 2016. *Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu*. Jurnal Ekonomi-Qu Vol. 6, No. 2, Oktober 2016, Hal. 115-139. Bengkulu: Fakultas Ekonomi Univ. Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
- Abdul Halim. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adi Nugroh dan Dina . 2018. *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Akhmad. 2019. Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah: Sebuah Kajian Teoritis dan Empitis. Yogyakarta: Azkiya Publishing.
- Amstrong, Michael. 2006. Seri Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia. A Hand Book Of Human Resources Management, Alih Bahasa Sofyan Cikmat Dan Haryanto. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Badan Pusat Statistika. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Danang Sunyoto. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama, Bandung.
- Firda Rizky Amalia. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 6, Juni 2014. Bali: Universitas Udayana.
- Fransisco. 2016. Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016, Hal. 1-13. Jambi: Universitas Negeri Jambi.
- Jehuda Jean Sanny Mongan. 2019. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal.163-176. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Mahirsyah Pradana. 2016. *Alokasi Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Marselus Palayukan. 2019. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal BPPK Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019 Halaman 74-91. Kendari: BKAD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riduwan. 2014. Dasar-dasar Statistika. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wardihan Sabar, 2019. Efek Belanja Modal Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ecces Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2019, page 171-189. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar